GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Kompas** **Tanggal** : **1 Februari 2007**

Subyek : **Banjir Jakarta** **Hari** : **kamis**

Halaman : **1**

Banjir Jakarta

Hidup Bersama Sungai Ciliwung

Amir Sodikin

Banjir pasti datang setiap tahun, tetapi dengan pemberitahuan lebih dulu. Ia tak mungkin ingkar, akan selalu memberi kabar dengan tanda-tanda. Jangan dihambat jalannya karena bisa menerjang semuanya. Banjir akan merenggut korban jika dilawan.

Inilah kunci yang harus disadari jika ingin tinggal secara harmonis bersama Sungai Ciliwung. "Pasti kami tahu kalau datang banjir, semua warga tahu dan tak akan ada yang terlewat. Saya sudah 40 tahun di sini dan tak pernah ada warga yang mati akibat kebanjiran," kata Nur Hidayah (40), warga asli kelahiran pinggir Kali Ciliwung di RT 11 RW 02 Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (31/1).

"Kami tak mau dipindah dari sini. Enak karena dekat pasar sehingga bisa jualan apa saja. Dari sungai juga ada rezeki sampah kalau mau mungut untuk dijual," ujar Darmiati (40), warga pinggir kali (girli) di RT 03 RW 02, yang telah 20 tahun mengontrak dengan biaya Rp 200.000 per bulan.

"Kalau airnya bening, bisa untuk nyuci. Kami sudah beranak pinak di sini, mana mungkin pindah," kata Marnah, warga RT 05 RW 03, menyela.

"Setiap tahun memang banjir, dan saya harus libur dari jualan es, tapi biar bagaimana, saya tak punya rencana pindah," kata Julo (40), warga RT 07 RW 01.

Alasan-alasan mereka, penghuni girli yang selalu kebanjiran, memang tak pernah dipahami oleh siapa pun di luar komunitas mereka. Oleh karena itu, selalu terjadi kontroversi menyangkut banjir tahunan, apakah itu sebagai bencana atau "perayaan" tahunan?

Derita pengungsi

Rabu kemarin lebih dari 1.000 warga Kampung Pulo sudah tiga malam mengungsi di depan SMP Santa Maria, Jatinegara. Sebagian perempuan dan anak- anak masih berada di pengungsian, sementara laki-laki dewasa mulai menengok rumah mereka. Sebagian memilih belum membersihkan rumah dari genangan lumpur karena diyakini "perayaan" banjir belum berakhir.

Siang itu tak hanya orang tua yang sakit. Ratusan anak balita pun jatuh sakit karena sanitasi di sekitar permukiman padat itu tidak sehat akibat direndam air. Cuaca dalam beberapa hari ini buruk. Mendung seolah menjadi teror bagi orang yang tak memahami dinamika Ciliwung.

"Sudah ratusan anak terserang batuk, panas, pilek, dan gatal-gatal," kata Ni'matul Hanani, dokter puskesmas yang melayani pengungsi. Terdengar horor, tetapi banyak warga yang menghadapinya dengan santai.

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Mereka yang terkena masalah kesehatan memang tampak lemah berbaring di pengungsian dan berharap cemas akan kesehatan keluarganya. Tetapi selalu ada petugas kesehatan yang datang membantu, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Walau makanan cukup terjamin, situasi di pengungsian yang tak leluasa layaknya di rumah sendiri menjadi faktor utama pendukung nuansa muram di pengungsian. "Ah, biasa saja di pengungsian, makanannya terjamin kok. Sekarang yang penting mengungsi dulu, nanti kalau sudah kering baru pulang," kata Marnah (55), seorang nenek, menepis berbagai anggapan.

"Cuma bantuan duitnya enggak ada," lanjut Marnah, sambil tertawa renyah.

Berbagai isu bahwa ada warga yang memanfaatkan banjir hanya untuk mendapat bantuan mereka tepis sendiri.

Di Gang I Kampung Pulo, warga yang pulang harus membersihkan lumpur. Mereka bekerja ekstra sambil menggunjingkan beberapa pejabat yang baru saja meninjau.

Hari itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memang mengunjungi posko pengungsian. Selain menanyakan kelengkapan di tempat pengungsian, Fauzi, yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, bercanda dengan pengungsi.

Kunjungan pejabat adalah salah satu bentuk selebrasi tahunan, yang hukumnya seperti wajib dilakukan oleh siapa pun pejabat yang ada di DKI Jakarta ataupun di Jakarta Timur. Selebrasi yang cukup menghibur warga adalah saat pejabat itu datang dan membawa bantuan, entah makanan atau fasilitas untuk mengungsi.

Semua berlangsung rutin setiap tahun, hingga tak ada yang heboh melihat pejabat datang. Walaupun tak begitu heboh menyambut pejabat yang datang, mereka pasti mempertanyakan pejabat yang tidak datang ke posko pengungsian banjir.

Beberapa partai politik juga memanfaatkan momentum itu untuk mendekatkan diri. Suasana di sepanjang jalan dekat posko pengungsian tampak meriah dengan bendera partai politik di tengah kota metropolitan Jakarta yang pragmatis.

"Penanganan banjir di Kampung Melayu memang sudah bagus. Bantuan datang mengalir dan pasti dikunjungi pejabat," kata seorang warga di Gang Arus, Kramat Jati, yang cemburu dengan kemeriahan di Kampung Melayu.

Tetap relokasi

Warga dengan berbagai rekayasa telah berusaha membuktikan bisa tinggal berdampingan dengan sungai dan banjir. Ibrahim, warga Gang Arus, misalnya, meninggikan lantai rumah hingga 1 meter selain menambah satu lantai rumah. Semua mebel dalam rumah telah dibuat "kedap air" sehingga sewaktu-waktu bisa ditinggal mengungsi.

Namun, rekayasa itu ternyata tak dianjurkan. Banjir adalah debit ekstrem dari sungai. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Siswoko menegaskan, warga girli memang bukan penyebab terjadinya banjir. "Mereka menjadi korban, bukan penyebab banjir," katanya.

Apakah karena itu mereka tidak boleh digusur? "Tetap harus digusur, tapi alasannya karena tinggal di tempat yang sangat berisiko dan tak layak," ujarnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dari sisi hukum alam, bantaran sungai merupakan dataran banjir yang menjadi jalan lewat air saat hujan turun karena adanya debit ekstrem. Daerah itu tak boleh diganggu karena memang bagian dari sungai.

Mau tidak mau, pemerintah harus merelokasi warga bantaran sungai. Harus diakui, ini merupakan ide klise sejak zaman dahulu kala. Berbagai rencana relokasi ditawarkan, tetapi selalu tak membuahkan hasil.

Siswoko mengatakan, salah satu kendala relokasi saat ini adalah mahalnya biaya pembebasan tanah. Dari pengalaman tahun 1996/1997 saat membebaskan 800 meter daerah bantaran sungai di dekat jembatan Casablanca, Jakarta Selatan, ternyata banyak bantaran sungai yang sudah bersertifikat.

"Akhirnya biaya pembebasan itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembangunan tanggulnya," kata Siswoko.

Ia tidak setuju dengan berbagai ide rekayasa bangunan di bantaran. "Prinsipnya, jangan halangi daerah aliran air. Secanggih apa pun bangunan itu, kalau yang datang banjir besar, tetap akan bermasalah. Mereka tetap akan digusur walaupun bisa membuktikan hidup berdampingan dengan Ciliwung," ujar Siswoko

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup